BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asas motivasi merupakan salah satu faktor penting dari manajemen yang sangat dirasakan keberadaannya, apabila penerapan motivasi tidak dilaksanakan dengan tepat, maka hasil akhir tidak akan tercapai dengan memuaskan. Motivasi dapat dicapai hasil akhir yang sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah ditentukan, maka fungsi motivasi harus mampu berjalan seefektif mungkin.

Seorang pemimpin harus benar-benar mengetahui, menguasai, mendalami dan menghayati semua asas-asas motivasi. Selanjutnya dapat menerapkannya dan melaksanakannya dengan tepat kepada setiap individu, sedangkan pelaksanaan itu sendiri harus benar-benar menguasai setiap rangkaian (bagian-bagian) dari pada gerak ke arah tujuan itu sesuai dengan fungsinya masing-masing dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab, maka diharapkan dapat menimbulkan gairah kerja tanpa ada paksaan.

4.1 Mengikutsertakan Kepala Sub Bagian Humas KPU dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* www.kpu.jabarprov.go.id

Mengikutsertakan artinya mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan pendapat, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Bawahan dapat diberikan motivasi untuk dapat memberikan gagasan pemikiran dan pengambilan keputusan. Keikutsertaan aparatur di berikan kesempatan untuk memberikan gagasan pemikiran, sehingga

mereka akan merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang di tetapkan bersama.

Menurut hasil wawancara Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat dapat mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan pendapat, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Bawahan dapat diberikan motivasi untuk dapat memberikan gagasan pemikiran dan pengambilan keputusan, memberikan kepada bawahan untuk dapat berpartisipasi, sehingga sosialisasi penghitungan suara pada pemilihan Gubernur dapat terlaksana dengan baik.

Menurut uraian diatas Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat senantiasa memberikan kesempatan kepada aparatur dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur jawa barat.

Motivasi merupakan suatu usaha positif dalam menggerakan dan mengarahkan sumber daya manusia agar secara produktif berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Motivasi merupakan kebutuhan dan sekaligus sebagai perangsang untuk mengarahkan sumber daya manusia ke arah tujuan yang diinginkan. Motivasi merupakan cara yang digunakan untuk merangsang pegawai untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pentingnya motifasi bagi aparatur, karena terdapat beberapa hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku.

Kegiatan sosialisasi idealnya dapat menjangkau seluruh warga masyarakat, terutama warga masyarakat yang memiliki hak pilih. Namun program sosialisasi

tidak mungkin dapat menjangkau seluruh warga masyarakat karena keterbatasan kemampuan KPU, sehingga beberapa kegiatan sosialisasi perlu dipilih kelompok sasaran yang menjadi prioritas, terutama sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat.

Pertimbangan untuk menentukan kelompok sasaran antara lain yang relatif lebih mudah menyerap informasi dan diharapkan mampu mengembangkan informasi tersebut lebih lanjut, keberadaan kelompok tersebut menyebar namun mudah dijangkau, dan kelompok sasaran tersebut dapat dianggap mewakili berbagai elemen masyarakat.

Sasaran kegiatan sosialisasi menurut informan adalah Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang teknis penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang langsung, umum,bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab. meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang berbagai aspek penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, meningkatnya kesadaran pemilih akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, meningkatnya kemampuan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Hak pilih masyarakat untuk menentukan pemimpinnya memang perlu difasilitasi agar Pilgub Jabar dapat berjalan secara demokratis. KPU Jabar sebagai penyelenggara pemilihan antara lain berkewajiban memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya secara proporsional. Masyarakat berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan

dengan Pilgub, sehingga mereka memiliki referensi yang cukup untuk menentukan pilihannya.

Salah satu media yang cukup efektif untuk menyebarluaskan informasi tentang pilgub adalah *Website*. Media ini merupakan sarana untuk memaparkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pilgub seperti daftar calon pemilih sementara, daftar calon pemilih tetap, profil kandidat gubernur dan wakil gubernur, berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu, serta informasi penting lainnya yang berguna bagi masyarakat.

Media ini memiliki kelebihan antara lain *stand by* selama 24 jam, dan dapat diakses oleh siapa saja baik masyarakat yang ada di Jawa Barat maupun masyarakat internasional, memiliki sifat dokumentatif, serta bisa di *down load* sesuai kepentingan pengakses. Bahkan jika dikelola secara profesional, *website* juga bisa menyediakan data yang bersifat aktual, sehingga dapat dijadikan referensi bagi para penyelenggara media massa. Masyarakat dan pasangan calon dapat mengamati perkembangan perolehan suara melalui media ini.

Maksud dan tujuan KPU Provinsi Jawa Barat khususnya Sub Bagian Humas dalam menggunakan media *website* adalah tidak lain untuk memudahkan masyarakat Jawa Barat untuk mengetahui hasil perolehan penghitungan suara pada pemilihan Gubernur. *Website* KPU Jawa Barat dimaksudkan sebagai media penyebarluasan informasi tentang pemilu dengan berbagai aspeknya untuk bisa diakses masyarakat serta pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu. *Website* KPU Jawa Barat bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat untuk

menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serta sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Keterangan LSM bahwa penyampaian informasi sosialisasi hasil penghitungan suara melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* merupakan proses penyampaian informasi yang cepat, dan murah kepada masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana hasil akhir perolehan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat, penyampaian informasi melaui *website* resmi yang dimiliki oleh KPU Provinsi Jawa Barat belum berjalan optimal dikarenakan pemahaman masyarakat belum sepenuhnya mengetahui bagaimana cara membuka situs resmi atau *website* yang dimiliki oleh KPU Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang pengembangan *e-Government* maka pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam menindak lanjuti dan mennyikapi diri untuk melaksanakan apa yang dinamakan *e-Government.* Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* ini merupakan situs resmi yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka memberikan informasi mengenai hasil penghitungan suara kepada masyarakat khususnya masyarakat Jawa Barat.

Keberhasilan sosialisasi penghitungan suara pada pemilihan Gubernur melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan suksesnya pemilu Gubernur Jawa Barat, baik sukses secara subtansi maupun secara prosedural. Secara subtansi di tandai dengan berlangsungnya prinsip-prinsip pemilu demokratis yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan Adil, secara prosedural di tandai dengan terlaksananya

penyelenggaraan pemilu secara lancar, tertib, aman dan beradab dengan dukungan penyelengaraan yang profesiaonal, peserta yang demokratis, pemilih yang cerdas dan logistik yang memandai.

Menurut hasil wawancara dengan aparatur Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat bahwa Ketua DPRD menyampaikan peryataan bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan tahapan pemilu secara benar dan sukses, namun wajar jika perlu perbaikan di kemudian hari, tetapi secara substansial telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Walaupun sempat terjadi ketidakpuasan dari sebagian pemilih terhadap hasilnya, tetapi dengan budaya saling asih, asah dan asuh secara logowo dapat diterima oleh semua pihak.

Pelayanan melalui media elektronik seperti internet dalam hal ini *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanaan. Salah satu inisiatif yang paling mudah dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang mengakses mengenai tahapan persiapan pemilihan gubernur, tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur, tampilan maskot sosialisasi, hasil penghitungan suara.

Dipilihnya Kepala Daerah secara langsung berarti suara rakyat menjadi penting dalam menyelenggaraan pemerintah dan kehidupan politik daerah, bagi partai politik, mau tidak mau partai politik berkewajiban mendengar dan merespon dengan tepat suara rakyat daerah jika masih ingin tetap eksis dan berperan dalam kepemerintahan dan kepolitkan daerah, yang lebih penting lagi adalah upaya secara alamiah untuk memperdayakan partai politik di daerah, agar partai lebih kuat dan mandiri, sehingga melahirkan kebijakan partai lebih kuat dan

mandiri, sehingga melahirkan kebijakan partai yang berorientasi kerakyatan, hal ini akan mendorong partai politik untuk memperluas kemampuan organisasionalnya dan tentunya akan mengembangkan prananata kelembagaan yang demokratis yang akan berdampak secara luas dan akan mendorong partisipasi masyarakat.

Kondisi ini akan membawa dampak yang tidak kecil terhadap penguatan *civil society* terutama bagi kehidupan politik masyarakat daerah, khususnya dalam meningkatkan kesadaraan politik rakyat. Rakyat menjadi terbiasa dalam Pemilu, berani berbeda dalam pilihannya, mampu menilai calon pimpinannya, rakyat, menjadi terdidik dalam berpolitik, berani mengkritisi pmpinannya dan yang paling penting adalah mampu memproses dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga Negara, dan untuk membentuk pemerintahan, partai politik melalui pelaksanaan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik, secara rill akan meningkatkan ksadaraan dan partisipasi politik masyarakat, mendukung integrasi dan persatuan nasional, mewujudkan keadilan, menegakan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menjamin terciptanya stabilitas keamanan.

Sistem politik demokrasi kebebasan dan kesetaraan tersebut diimplementasikan agar dapat mereflesikan kebersamaan yang menjadi terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh. Proses menuju kehidupan

politik yang memberikan peran kepada partai politik sebagai asset nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan berkesinambungan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab berdemokrasi, hal ini dapat dicapai melalui penataan kehidupan kepartaian.

Karakteristik peran serta Kepala Sub Bagian Humas merupakan hal yang sangat mendasar untuk keberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat, keberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara tidak luput dari peran masyarakat, Partai Politik, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Menurut hasil wawancara untuk keberhasilan sosialisasi hasil penghitungan suara sangat dibutuhkan para agen untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, agen disini adalah Partai Politik dan LSM,

Menurut hasil wawancara sosialisasi dilakukan dengan maksud agar pemilih dapat mengetahui dan memahami mengenai tahapan pemilu serta berbagai aspek pemilu terutama mengingatkan hari minggu tanggal 13 April 2008 merupakan proses pemungutan dan penghitungan secara serempak dilakukan di TPS seluruh Jawa Barat, memahami mengenai apa dan bagaimana KPU sebagai penyelenggaraan pemilu pentingnya partisipasi dalam pemilu, mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya secara rasional, menciptakan situasi yang kondusif sehingga pemilu dapat berjalan secara damai tanpa konflik dan kekerasan.

Partisipasi pemilih dalam pemilu Gubernur Provinsi Jawa Barat relatif cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi pilkada di provinsi lain,

dengan demikian bahwa pelaksanaan pemilu Gubernur Provinsi Jawa Barat berhasil dengan baik berkat peran serta seluruh elemen masayarakat Jawa Barat.

Penyelenggaraan pemilu Gubernur dan wakil guberur yang cukup rumit dengan aspek manajemen yang penuh tantangan. Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, Provinsi Jawa Barat dengan pemilih terbesar, maka banyak pihak yang memperhatikanya baik regional maupun nasional, bahkan sampai ke mancanegara. Tantangan bukan aspek logistik, tetapi juga kultur masyarakat Jawa Barat yang multi dimensi yang juga merupakan tantangn serius dalam rangka mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat. Terpilihnya pasangan H. Ahmad Heryawan dan H. Dede Yusuf merupakan buah dari partisipasi masyarakat Jawa Barat yang memilih langsung.

Menurut Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat untuk keberhasilan sosialisasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur, melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat sipil, yang telah menunjukan bahwa dukungan berbagai pihak serta memberikan konstibusi yang tidak sedikit.

Pengawasan merupakan fungsi organik dalam setiap kegiatan organisasi, tanpa ada pengawasan setiap aktivitas organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya tujuan yang diinginkan. Pengawasan ditujukan agar pelaksanaan kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan, serta melakukan tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan agar tercapainya tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

Pengawasan mengacu suatu bentuk monitoring yang dilakukan oleh pihak luar, sistem pengawasan kerja yang laksanakan oleh Sub Humas KPU Provinsi

Jawa Barat dalam melaksanakan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur, menurut hasil wawancara, pengawasan kerja dilakukan langsung oleh aparatur KPU Provinsi Jawa Barat tidak dapat tertangani dengan sebaik mungkin di karenakan jumlah aparatur KPU sangat sedikit jumlahnya, untuk menutupi kekurangan tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat mengkrekrut pihak ketiga untuk membantu mengelola dan menyediakan peralatan dan perlengkapan. sebagai media pelayanan informasi kepada publik menggunakan media *center* dan melalui *website* yang dimiliki oleh KPU Provinsi Jawa Barat.

Menurut uraian diatas, bahwa pengawasan kerja yang dilakukan oleh Sub Humas KPU Provinsi Jawa Barat, sudah cukup efektif, karena sistem pengawasannya menggunakan pihak ketiga, dalam mengolah, menyediakan peralatan, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya sistem pengawasan oleh pihak ketiga kemungkinan tidak ada kecurangan-kecurangan menambah atau mengurangi data perolehan suara.

Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang cukup rumit sudah barang tentu aspek manajemen yang penuh tantangan di tambah dengan fakta Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, hal ini semakin menyedot perhatian banyak pihak baik regional maupun Nasional bahkan sampai Manca Negara. Tantangan bukan hanya aspek logistic, juga kultur masyarakat Jawa Barat yang multi dimensi yang juga merupakan tantangan serius dalam rangka mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas tugas dan peran Media Center adalah untuk membantu merancang program dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, membantu mengumpulkan mengelola, analisa, serta pengkajian data informasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, melakukan aktifitas jurnalistik dan membantu kegiatan penerbitan bulletin Jurnal KPU Jawa Barat, membina hubungan dengan jurnalistik dan media massa serta komponen masyarakat, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan KPU Jawa Barat yang berkaitan dengan informasi dan publikasi, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada KPU Provinsi Jawa Barat.

Media Center merupakan mitra KPU yang penting sehingga sosialisai komunikasi dan informasi demi terselenggaranya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang berkualitas dapat terlaksana dengan baik, selain melakukan kegiatan jurnalistik sebagai materi sosilisasi melaui media *website* dan bulletin jurnal KPU Media *Center* memposisikan sebagai fasilitator KPU dengan Media Masa sehingga terbangun hubungan strategis antara keduanya dalam memberikan informasi yang lengkap dan akurat yang dikemas secara manarik. Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Media Center memberikan pelayanan informasi kepada para wartawan dan semua media baik cetak maupun elektronik. Berbagai upaya dilakukan untuk kemudahan bagi para wartawan dalam mengakses informasi KPU.

Aktifitas yang dikerjakan adalah membuka akses layanan informasi bagi wartawan atau via telepon hingga layanan informasi yang dikirim langsung ke

Kantor redaksi masing-masing media masa melalui *faxs* dan *email*. Dengan dukungan penuh media massa sosialisasi yang di selenggarakan KPU dapat berhasil sehingga seluruh komponen masyarakat dapat berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Media *center* tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator KPU dengan Media massa juga dengan publik, media center melayani masyarakat yang datang langsung atau melalui publik forum yang tersedia di situs internet KPU *www.kpu.jabarprov.go.id*, demikian pula media center juga memposisikan sebagai Bank data dan juga informasi internal maupn eksternal KPU.

Sosialisasi yang dilakukan media *center* merupakan informasi dan surfei sejauh mana tingkat efektifitas sosialisasi yang dilakukan KPU sekaligus sebagai jawaban dan kritik sejumlah pengamat yang menyoroti tentang lemahnya sosialisasi KPU Provinsi Jawa Barat. Demikian juga sosialisasi ini tidak hanya memakan dana yang besar namun juga melibatkan organisasi secara luas melalui kalangan pemerintah, LSM di Jawa Barat.

Hambatan dalam sosialisasi adalah limitasi waktu yang sangat pendek maka KPU dan media center harus bekerja keras untuk melakukan berbagai cara yang paling efektif untuk sosialisasi yang pada akhirnya di tuntut mengajar target informasi yang cukup agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara besar dan berkualitas. Namun disamping kritikan banyak pula simpati dan bantuan ikhlas oleh karenanya ucapan terima kasih sepantasnyalah di sampaikan kepada media *center*, Ormas, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh agama karena memiliki andil yang besar bagi keberhasilan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Barat, sehingga membuktikan bahwa penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dapat berjalan lancar, aman dan terkendali.

Berdasarkan keterangan LSM, hasil penghitungan suara sudah cukup cepat jika dibandingkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada waktu pemilihan tahun 2004 yang lalu, hasil suara dilihat langsung di *website* yang dimiliki oleh KPU Provinsi Jawa Barat, Pada saat pencatatan hasil suara ke dalam sertifikat hasil perhitungan suara tidak ada kesesuaian hasil suara dan tidak lagi pembacaan tulisan tangan, melainkan dengan adanya *website* mudah diimplementasikan dan dioperasikan, waktu pengiriman data sangat cepat, keamanan data terjamin. Berdasarkan hasil uaraian diatas sudah jelas bahwa, *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* merupakan sistem yang cepat, dan dapat diakses oleh masyarakat, LSM, Partai Politik yang ingin mengetahui hasil perolehan suara.

Menurut hasil wawancara sosialisasi dilakukan dengan maksud agar pemilih dapat mengetahui dan memahami mengenai tahapan pemilu serta berbagai aspek pemilu terutama mengingatkan hari minggu tanggal 13 April 2008 merupakan proses pemungutan dan penghitungan secara serempak dilakukan di TPS seluruh Jawa Barat.

Memahami mengenai apa dan bagaimana KPU sebagai penyelenggaraan pemilu membangun *awarenes*s masyarakat pentingnya partisipasi dalam pemil, mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya secara rasional. Menciptakan situasi yang kondusif sehingga pemilu dapat berjalan secara damai tanap komplik

dan kekerasan. Menurut uraian diatas sudah jelas bahwa tujuan sosialisasi yang dilakukan oleh media center untuk mengetahui dan memahami mengenai tahapan pemilu, mendorong masyarakat Jawa Barat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat bahwa alasan menggunakan media *center* dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat karena, media *center* dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat, dan jurnalis dan semua media baik media cetak maupun media elektronik. Media *center* melayani masyarakat yang datang langsung. Informasi hasil pemilu melalui *IT* menjadi tuntutan masyarakat karena masayarakat ingin mengetahui hasil pelaksanaan pemilu, dan mengetahui hasil penghitungan suara secara jelas, tepat, dan akurat.

Berdasarkan uraian diatas sudah jelas bahwa media *center* merupakan mitra KPU yang penting. Media *center* dibentuk oleh KPU Jawa Barat, pembentukan media *center* didasari bahwa sosialisasi merupakan aspek penting yang menompang suksesnya hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat. KPU Provinsi Jawa Barat membuat desain sistem informasi pemilu melalui pembentukan media *center* melalui keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 17/Kep/KPU-JB/2008.

Berdasarkan hasil wawancara hasil penghitungan suara Pilkada Jawa Barat yang dilakukan KPU Jawa Barat hingga Senin (14/4) pukul 10.30 WIB, untuk sementara pasangan Hade masih memimpin dengan perolehan suara tiga puluh

sembilan koma delapan puluh lima persen Posisi kedua ditempati pasangan H Agum Gumelar dan H Nu`man Abdul Hakim (Aman) yang diusung PDIP dan PPP dengan tiga puluh tiga koma lima persen suara serta pasangan H Danny Setiawan dan H Iwan Sulanjana (Da`i) yang diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat di urutan ketiga dengan perolehan suara sementara dua puluh enam koma enam puluh dua persen Sementara itu berdasarkan hasil penghitungan cepat (*quick count*) yang dilakukan beberapa lembaga survei dan tim media massa, pasangan H Ahmad Heryawan dan H Dede Yusuf juga menempati posisi teratas dengan angka sekitar tiga puluh sembilan persen.

Selesai pelaksanaan rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan hasil pemilu, yang didasarkan atas Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (Lima Puluh Persen) jumlah suara sah, ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan, apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) jumlah suara sah, ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

Sesuai dengan hasil rekapitulasi pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, maka KPU Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Nomor 46/Kep/KPU/JB/2008 tanggal 22 April 2008 telah menetapkan H. Ahmad Heryawan, dan H. Dede Yusuf , sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Berdasarkan keterangan dari DPD Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong bahwa Gubernur terpilih adalah (HADE) H. Ahmad Heryawan, dan

H. Dede Yusuf adalah pasangan baru yang akan memimpin Jawa Barat, masyarakat berharap bahwa pasangan ini akan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang optimal sehingga anggka pengangguran dapat diatasi, banyaknya wisata kuliner yang di buka dapat membantu anggka pengangguran yang semakin berkurang, masyarakat berharap kepada pemerintah agar memperbanyak pariwisata sehingga Provinsi Jawa Barat menjadi *tourism of pure in our country*.

4.2 Komunikasi Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Dalam Mensosialisasikan Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 Melalui *Website* ***www.kpu.jabarprov.go.id*.**

Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Humas KPU sebagai pelaksana kebijakan adalah komunikasi melalui transformasi atau penyampaian informasi kepada masyarakat Jawa Barat sebagai pengguna layanan informasi yang berkaitan dengan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat, menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat dan adanya konsistensi penyampaian informasi kepada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Humas Komunikasi menunjukkan proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima. Oleh karena itu, komunikasi akan berhasil dengan baik apabila pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh penerima pesan.

Komunikasi merupakan suatu konsep yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak, di mana hal tersebut merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Pada dasarnya,

komunikasi memberikan kontribusi besar pada kehidupan masyarakat yaitu memberikan dasar atau pondasi kepada tiap individu pada masyarakat dalam menciptakan partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Selain itu, melalui komunikasi memungkinkan lingkungan masyarakat yang kondusif, karena tanpa komunikasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.

Pemanfaatan dan dukungan teknologi informasi di berbagai bidang sudah menjadi kebutuhan pada saat ini. Kecepatan proses, perhitungan suara, dan otomatisasi kegiatan menjadi daya tarik dari teknologi informasi. Infrastruktur yang makin lengkap dan kesiapan masyarakat terhadap teknologi informasi juga menjadi pendukung dari penerapan teknologi informasi. Nilai manfaat dari teknologi informasi dapat diperoleh dengan penggunaan teknologi informasi secara tepat dan baik. Kesalahan penerapan teknologi informasi sering kali menimbulkan kerugian dan tidak menghasilkan nilai lebih. Karena itu analisis yang baik dan pemakaian teknologi yang tepat disesuaikan dengan lingkungan dan sistem yang ingin didukung menjadi bagian yang sangat penting.

Proses komunikasi, setiap unsur yang ada didalamnya yaitu pemerintah dan masyarakat merupakan penentu keberhasilan komunikasi sehingga tepat sasaran. komunikasi yang dilaksanakan dengan bersasaran kepada objek komunikasi yaitu masyarakat dengan maksud untuk menginformasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur jawa barat. Proses penyampaian informasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*.

Tugas inti dari aparatur adalah mengkomunikasikan kebijakan dengan baik, supaya objek komunikasi lebih paham dan mengerti tentang maksud dan tujuan dari materi yang di komunikasikan. Pesan-pesan yang disampaikan oleh apartur kadangkala berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain, tetapi proses komunikasi dapat berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh apartur tidak bertentangan atau saling mendukung satu sama lain.

Penyediaan teknologi informasi melalui *website* KPU Provinsi Jawa Barat khususnya Sub Bagian Humas memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dalam memberikan informasi mengenai hasil perolehan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat, kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi hasil penghitungan suara merupakan suatu hasil yang harus diperhatikan. Karena masayarakat Jawa Barat yang memberikan suara pada pemilihan Gubernur, siapapun yang akan menjadi pemenang dalam pemilu, baik atau buruknya pemerintahan yang dipimpinnya pada hakekatnya masyarakat Jawa Barat yang akan merasakan dampak nya.

Tingkat kemudahan masyarakat Jawa Barat dalam mendapatkan informasi hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur Jawa Barat tergantung dari apa yang telah disediakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat khususnya oleh Sub Bagian Humas. KPU Provinsi Jawa Barat melalui Sub Bagian Humas bertanggung jawab atas kelayakan, kelancaran, dan kesuksesan atau tidaknya mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*, kualitas informasi yang dihasilkan dapat memberikan

hasil yang relevan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terhadap hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat

Komunikasi dalam organisasi sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan organisasi. Komunikasi merupakan jiwa interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu pula di dalam organisasi komunikasi diperlukan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan tukar menukar informasi antara ketua organisasi dengan anggota organisasi atau sebaliknya dari anggota organisasi dengan ketua organisasi dan antar sesama anggota organisasi. Komunikasi merupakan menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya dan kendala-kendala yang dihadapi.dengan cara ini maka motivasi akan meningkat.

Kejelasan proses informasi mengenai penghitungan suara, menurut hasil wawancara dalam penghitungan suara pemilihan Gubernur Jawa Barat, untuk menetapkan hasil pemilunya sudah cukup baik dikarenakan dalam penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat, adalah melalui penghitungan berjenjang yang bersertifikat, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS di rekap di Kecamatan di PPK berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, ditandatangani oleh PPS, dan ditandatangani oleh para saksi sehingga sertifikat tersebut betul-betul absah. Hasil rekap di PPK dikeluarkan hasil rekapitulasi yang ditandatangani oleh PPK dan para saksi, dibawa ke KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi. Memberikan pelayanan informasi yang cepat kepada publik, yang digunakan menetapkan adalah melalui rekapitulasi berjenjang.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa hasil penghitungan suara prosesnya tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan secara berjenjang, hasil penghitungan suara di TPS di rekap di Kecamatan di PPK berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, ditandatangani oleh PPS, dan ditandatangani oleh para saksi sehingga sertifikat tersebut betul-betul absah. Hasil rekap di PPK dikeluarkan hasil rekapitulasi yang ditandatangani oleh PPK dan para saksi, dibawa ke KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi PPK dalam merekap hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPPS, kemudian KPU Kabupaten/Kota merekap hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK, selanjutnya rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat tujuan menggunakan *website* dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara adalah Media ini memiliki kelebihan antara lain *stand by* selama 24 jam, dapat diakses oleh siapa saja baik masyarakat seluruh Jawa Barat maupun masyarakat internasional, serta bisa di *down load* sesuai kepentingan pengakses. Bahkan jika dikelola secara profesional, *website* juga bisa menyediakan data yang bersifat aktual, sehingga dapat dijadikan referensi bagi para penyelenggara media massa. Kecuali itu, pada saat-saat tertentu, masyarakat dan pasangan calon dapat mengamati perkembangan perolehan suara melalui media *website* ini.

Media yang cukup efektif untuk mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur adalah melalui *website*. Media ini merupakan

sarana untuk memaparkan berbagai informasi yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur seperti daftar calon pemilih sementara, daftar calon pemilih tetap, profil kandidat gubernur dan wakil gubernur, berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu, serta informasi penting lainnya yang berguna bagi masyarakat.

Hak pilih masyarakat untuk menentukan pemimpinnya memang perlu difasilitasi agar Pilgub Jabar dapat berjalan secara demokratis. Sub Bagian Humas KPU Jawa Barat sebagai penyelenggara pemilihan antara lain berkewajiban memberikan nilai informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya secara proporsional. Masyarakat berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur, sehingga mereka memiliki referensi yang cukup untuk menentukan pilihannya.

Maksud dan tujuan penggunaan *website* dalam penyebarluaskan informasi kepada publik maksudnya *website* dimaksudkan sebagai media penyebarluasan informasi tentang pemilu dengan berbagai aspeknya untuk bisa diakses masyarakat serta pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu. Sedangkan tujuannya adalah *website* bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serta sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat bahwa, Penghitungan suara di KPU Provinsi Jawa barat dilakukan 1 (satu) minggu setelah pemungutan suara, apakah Sistim Penghitungan Suara itu tuntas, menurut hasil wawancara, Sistim Penghitungan Suara tersebut

belum dikatakan tuntas, jadi ketika penghitungan suara ditingkat Provinsi, Sistim Penghitungan Suara nya sendiri belum mencapai seratus persen, karena terdapat kendala bahwa PPK sudah merekap dan menyampaikan ke Kab/Kota ada tambahan dari TPS yang sebelumnya belum masuk ke Sistim Penghitungan Suara, untuk dihitung yang ditampilkan ke *website* *www.kpu.jabarprof.go.id*, dan mereka menganggap bahwa ini semua sudah tidak perlu, karena sudah mengeluarkan sertifikat rekap. Sistim Penghitungan Suara nya sendiri berhenti sekitar 2 (dua) hari sebelum penetapan. Hal ini dikarenakan pengumpulan suara dari tingkat Desa dan Kecamatan seharusnya diserahkan ke KPU Provinsi tidak serentak.

Website *www.kpu.jabarprov.go.id* merupakan proses penyampaian informasi yang cepat, dan murah. Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* memberikan penjelasan-penjelasan secara lengkap tentang hasil suara pada pemilihan gubernur Jawa Barat, walaupun masyarakat belum sepenuhnya mengerti atau mengetahui bagaimana cara membuka situs resmi atau *website* yang dimiliki oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Hanya saja kebayakan masyarakat Jawa Barat mengetahui hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur melalui media elektronik dan surat kabar yang dimenangkan oleh H. Ahmad Heryawan dan H. Dede Yusuf (HADE) sebagai pasangan yang terpilih untuk memimpin Provinsi Jawa Barat.

Menurut uraian diatas sudah jelas bahwa masyarakat Jawa Barat mengetahui hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur melalui media elektronik dan surat kabar, jadi peran *website* dalam mensosialisasikan hasil

penghitungan suara pada pemilihan gubernur belum berjalan secara efektif, dikarenakan masih banyak masyarakat Jawa Barat belum bisa membuka atau mengakses *website* hanya kalangan atau orang tertentu saja yang dapat mengaskses *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*.

Menurut hasil wawancara, Staf Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat memiliki data pelaksanaan sistim penghitungan suara, data dibawah ini adalah data awal sebagai pelaksanaan sistim penghitungan suara, diantaranya data pelaksana sebagai berikut: Perkiraan *scope* pekerjaan, pembuatan Jadwal, pendefinisian *resource* yang dibutuhkan dan mobilisasi sumber daya manusia serta output yang dihasilkan selama proses kegiatan berlangsung, mencakup rencana detil pengerjaan, pembagian deskripsi tugas yang jelas antar personil yang terlibat, pembuatan jadwal yang ketat, mekanisme pelaporan pengerjaan tugas (progress report) setiap personil yang dibuat harian, serta pembuatan jadwal dan target penyelesaian pekerjaan harian.

Kedua, Analisis kebutuhan mencakup analisis sistem kini (sistem aplikasi pencatatan anggaran yang sudah ada sebelumnya), analisis kebutuhan data, analisis kategori pengguna, dan berbagai kriteria perangkat lunak. *Ketiga*, Perancangan Aplikasi Situng KPU meliputi desain arsitektur, database, proses, fitur, tampilan, dan pengelolaan *entry, update, delete* menu administrator Aplikasi Situng. *Keempat*, Pengembangan sistim penghitungan suara (*kooding*) dari perencanaan yang telah dibuat. *Kelima*, Pengujian perangkat lunak dan SOP, yang dilakukan oleh *Quality Assurance* pengembang perangkat lunak dan *client*

Peralatan dan material yang digunakan oleh Pengguna Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan sistim penghitungan suara berupa perangkat lunak sebagai tools pengembangan. Dengan deskripsi rekomendasi basis pengembangan aplikasi pada kegiatan sistim penghitungan suara KPU Propinsi Jawa Barat melalui Sub Bagian Humas dapat dilihat pada Bab III di gambar 3.1

Gambar 3.1 Sistem Operasi Server diperuntukan untuk, data-data dari hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dari TPS, PPK, KPU Kab/Kota, semua data tersebut dikumpulkan ke KPU Provinsi untuk dihitung, penghitungan menggunakan aplikasi *server database*, server database yang digunakan dalam penghitungan suara pada pemilihan Gubernur menggunakan Linux Fedora atau XP professional, DBMS menggunakan MySQL, bahasa pemprogaman menggunakan PHP, dan Tools Desain menggunakan Microsoft Visio 2003, Power Designer, Adobe Photoshop, Corel Draw.

Menggunakan aplikasi ini memiliki *output* pekerjaan, menurut hasil wawancara dengan Staf Teknis Penyelenggaraan output pekerjaan mempunyai 4 (empat) kategori, yang *Pertama*, aplikasi Situng dapat beroprasional dengan baik. *Kedua*, format penghitungan suara dan surat suara menggunakan *format Excel*. *Ketiga*, Dokumen laporan pelaksanaan pengerjaan kegiatan pengembangan mencakup laporan awal dan laporan akhir.

Keempat menggunakan dokumen manual dan instalasi Aplikasi Situng, kaitan dengan *output*, bahwa dokumen yang merupakan *output* kegiatan dapat dijadikan acuan untuk pengembangan di masa depan, aplikasi yang diinstal dan dikonfigurasikan pada *server* dan DBMS yang ada.

Penyampaian hasil pemilu menurut hasil wawancara dengan aparatur Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat paling lambat 3 (tiga) hari setelah penepatan hasil pemilu, KPU wajib menyampaikan hasil pemilu kepada DPRD Provinsi untuk diproses pengesahannya sesuai dengan perundang-undangan. Menurut uraian diatas sudah jelas bahwa penyampaian hasil pemilu Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah penepatan hasil pemilu, KPU wajib menyampaikan hasil pemilu kepada DPRD Provinsi.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyampaian informasi mengenai hasil penghitungan suara melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*, menurut hasil wawancara dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Eksistensi sumber daya manusia ini posisinya sangat mutlak dalam suatu kegiatan organisasi, maka salah satu hal yang perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan dari sumber daya manusia yaitu para pegawai dilingkungan aparatur pemerintah, agar semakin mempunyai kemampuan teknis dan manajerial untuk melayani kepentingan dan kebutuhan pengguna jasa.

Berdasarkan uraian diatas sudah jelas bahwa kendala proses penyampaian informasi hasil penghitungan suara karena faktor sumber daya manusia, manusia adalah motor penggerak segala sesuatu kegiatan, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang efektif diperlukan kemampuan aparatur yang memiliki kemampuan dibidangnya dan teknologi informasi terus berkembang sesuai dengan zaman. Sehingga ada kemungkinan perubahan basis pengembangan di masa depan, disertai dengan alasan teknis yang kuat dan mengarah kepada hasil akhir yang lebih baik

4.3 Pengakuan Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Dalam Mensosialisasikan Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 Melalui *Website* ***www.kpu.jabarprov.go.id*.**

Karakteristik Pengakuan Kepala Sub Bagian Humas untuk mensosialisasikan hasil penghitungan suara melalui *website,* dapat dipengaruhi oleh sumber daya, sumber daya mencangkup sumber daya manusia, modal, dan waktu, struktur birokrasi, norma-norma atau aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting sebagai penggerak atau motor karena manusia yang akan melaksanakan kebijakan. Kriteria manusia yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur melalui *website*.

Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam kebijakan, karena manusia yang akan melaksanakan kebijakan. Kriteria manusia yang dapat menunjang keberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur jawa barat melalui *website*, yaitu berpotensi, mempunyai keterampilan, pintar, terdidik dan terlatih serta siap sebagai pelaksana kebijakan.

Sumber-sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur jawa barat melalui *website* dalam meningkatkan pelayanan publik, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat adalah Sumber Daya Manusia, Modal dan Waktu yang mempengahruhi keberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur.

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang dapat menentukan keberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur Jawa Barat melalui *website* kepada publik, karena manusia adalah sebagai unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan. Dalam hal ini sumber daya manusia yang dapat menentukan keberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur Jawa Barat melalui *website* adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi yang handal.

Potensi yang handal tersebut dapat dilihat berdasarkan kriteria-kriteria, kriteria yang dimaksud ditentukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Kriteria yang diperlukan adalah mereka yang ahli dalam bidang komputer dan mampu untuk mengoperasionalisasikannya serta ahli dalam administrasi.

Sumber daya manusia yang ada di Sub Bagian Humas, KPU Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan kriteria tersebut masih banyak mereka yang tidak menguasai komputerisasi hanya sebagain staff yang ahli dalam operasionalisasi komputer.

Sumber daya manusia yang ada di Sub Bagian Humas, KPU Provinsi Jawa Barat belum dapat dikatakan memadai, karena masih banyak yang belum dapat mengusai bidang komputer yang dapat menunjang keberhasilan mensosilisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur Jawa Barat belum terlaksana dengan maksimal, untuk mengatasinya KPU Provinsi Jawa Barat melakukan langkah penyeleksian pegawai yang ahli dalam bidang komputer yang dapat mendukung keberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur Jawa Barat.

Sumber daya manusia yang berpotensi diperlukan karena dapat memberikan dukungan mengenai keberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur Jawa Barat, sumber daya manusia yang diperlukan adalah yang mempunyai keahlian atau yang mampu dalam bidang komputer.

Sesuai dengan kenyataan yang diperlukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat khususya di Sub Bagian Humas sumber daya manusia belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan dalam berbagai hal, diantaranya adanya keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mendukung kebeberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur Jawa Barat melalui *website.*

Melalui upaya peningkatan potensi dan kapabilitas sumber daya manusia melalui jenjang pendidikan maka berbagai program pembangunan yang multi dimensi dapat berjalan dengan baik, karena mutu sumber daya manusia yang berpendidikan relatif tinggi tentunya wawasan, pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan pun akan mampu mengimbangi tuntutan dan perubahan masyarakat yang kompleks dan bergerak cepat.

Kemajuan tekonologi dan informasi merupakan realita yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindari di era modern. Pesatnya perkembangan teknologi informasi akan membawa dampak perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang menginginkan adanya kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju merupakan peluang bagi setiap instansi dan lembaga pemerintahan untuk dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dalam rangka meningkatkan pembangunan ditingkat nasional maupun daerah. upaya untuk mengfektipkan penggunaan teknologi dan informasi dilembaga pemerintahan merupakan upaya dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi.

Menurut beberapa informan penyediaan sarana dan prasarana Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat untuk mendukung dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur melalui *website,* dapat dilihat dari penyediaan komputer yang terdapat di Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat jumlahnya hanya tiga (3) buah komputer, hal ini tentunya akan mengganggu kelancaran tugas. Seorang pemimpin harus menyediakan sarana dan prasarana informasi bagi bawahannya

Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat dalam penyediaan perangkat jaringan komputer. Sebagai sarana pembuat *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Penyediaan infrsastruktur jaringan komputer ini dibiayayai oleh anggaran APBD dalam setiap tahunnya penerapan *website* merupakan bagian dari perencanaan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai sarana pencapaian visi dan misi KPU Provinsi Jawa Barat informasi melalui *website* merupakan alternatif dalam meningkatkan standarisasi pelayanaan sehingga dapat mensosialisasikan hasil penghitungan suara yang cepat ke pada masyarakat Jawa Barat.

Struktur organisasi adalah suatu bentuk susunan keanggotaan yang membedakan jabatan masing-masing personil didalam suatu organisasi, atau dengan kata lain struktur organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi organisasi yang menetapkan hubungan tertentu, garis-garis perintah atasan dan bawahan agar dapat dimengerti dan dilaksanakan dalam bentuk tugas untuk mencapai tujuan organisasi

Birokrasi sebagai ujung tombak pelaksanaan pelayanan publik yang mencakup berbagai program-program pembangunan. Dalam birokrasi terdapat struktur organisasi, menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas struktur ini mencangkup tata hubungan kerja antara apartur eksekutif dengan pelaksana. Struktur organisasi di KPU Provinsi Jawa Barat telah disesuaiakan.

Berdasarkan uraian diatas tentang pembentukan dan susunan organisasi bahwa struktur organisasi untuk menciptakan kultur organisasi yang diterapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat khususnya di Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat adalah struktur organisasi garis dan staf, maksudnya adalah dalam setiap tingkat level organisasi dikepalai oleh seseoarang atasan yang membawahi beberapa orang aparatur. Jadi seoarang aparatur hanya bertanggungjawab kepada seorang atasan.

Suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan, tercapainya tujuan orgnisasi terdapat

hubungan yang erat antara kinerja perorangan dengan kineja organisasi, dengan kata lain kinerja sumber daya aparatur pemerintah baik, maka kemungkinan besar kinerja instansi pemerintah akan baik bila memiliki keahlian (*skill*) yang tinggi, bersedia bekerja karena digaji sesuai dengan perjanjian, mempunyai harapan masa depan lebih baik.

Bentuk struktur organisasi yang tepat didasarkan atas bermacam-macam aspek yang relevan. Dalam struktur organisasi dijumpai adanya kekhususan dari pembagian kerja, hubungan dari fungsi-fungsi dan kegiatan yang berbeda yang memperlihatkan hierarki wewenang berikut tanggungjawabnya. Struktur organisasi harus dibentuk sedemikian rupa, sehingga setiap aparatur mengetahui apa yang harus dilakukan dan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tertentu, sehingga dapat menghilangkan keraguan dan ketidakpastian dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Sruktur birokrasi memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan dan menciptakan kultur birokrasi yang kondusif. Sub Bagian HumasKPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan *Standar Operation Procedures (SOP).* SOP ini dibentuk sebagai pedoman dasar bagi pelayanan kepada masyarakat

SOP memiliki manfaat sebagai berikut. Sebagai standarisasi yang wajib dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berlangsung sebagaimana seharusnya.

SOP memiliki manfaat sebagai berikut. Sebagai standarisasi yang wajib dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berlangsung sebagaimana seharusnya. Menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan proses. Meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam pelaksanaan tugas.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Memberikan cara konkrit untuk perbaikan kinerja. Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan tumpang tindih pelaksanaan tugas. Membantu Pejabat Administrasi Pemerintahan yang terlibat dalam proses pelayanan menjadi lebih mandiri. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar dan memberikan informasi kinerja.

Budaya kerja ini diharapkan tidak terhenti sebagai wacana melainkan benar-benar bisa terwujud sebagai *standard operating procedure*. Karena itu dua pendekatan dapat ditempuh secara strategis yaitu sosialisasi dari dalam aparatur sendiri dipadukan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat sangat strategis karena dapat membentuk opini publik yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap perubahan lingkungan sosial yang mampu memaksa perubahan sikap dari perilaku setiap aparatur.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas KPU Provinsi Jawa Barat kondisi budaya kerja yang diharapkan terbangunnya kultur birokrasi pemerintah untuk mewujudkan kondisi tersebut antara lain *pertama*, terciptanya iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan

produktivitas yang tinggi melalui pengembangan budaya kerja yang membentuk perubahan sikap dan perilaku serta motivasi kerja, *kedua*, dengan pengembangan budaya kerja yang tinggi, terbentuk sikap, perilaku dan budaya kerja pegawai yang etis, bermoral, profesional, disiplin, hemat, hidup sederhana, jujur, produktif, menghargai waktu, menjadi panutan dan teladan, serta mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas dalam pembagian tugasnya tidak adanya aturan yang jelas dalam pembagian tugasnya, khususnya Staff tanpa jabatan, sebenarnya PNS itu semuanya pejabat, bisa dikatakan pejabat struktural, dan Pejabat non struktural. Pejabat struktural adalah pejabat yang memiliki suatu jabatan tertentu yang diembannya, sedangkan pejabat non struktural tidak memiliki jabatan dalam penempatan kerja yang jelas, misalnya staff di Kepala Bagian Humas, kepala bagian humas nya adalah pejabat, sedangkan staff nya adalah pejabat non struktural, setiap orang staff harus memiliki job-job tersendiri yang melekat, hal ini disadari oleh KPU Provinsi Jawa Barat, bahwa pembagian keja di staff belum jelas, karena tidak adanya label tugas yang jelas pada setiap staff di KPU Provinsi Jawa Barat.

Menurut hasil uraian diatas bahwa pembagian tugas di KPU Provinsi Jawa Barat khususnya di Sub Bagian Humas tidak adanya aturan yang jelas dalam pembagian tugasnya, tidak adanya label tugas yang jelas pada setiap staff di KPU Provinsi Jawa Barat, sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja aparatur.

Oragnisasi diperlukan adanya norma-norma yang berlaku, Norma dalam suatu organisasi merupakan ukuran bagi seluruh anggota organisasi untuk

berperilaku dan bersikap sesuai dengan kaidah-kaidah norma yang diterapkan oleh suatu organisasi, serta etika merupakan yang membungkus tingkah laku anggota organisasi tersebut untuk bertindak sesuai dengan kriteria norma yang berlaku.

Norma atau aturan merupakan standar yang diterima oleh anggota organisasi, yang mempunyai karakteristik tertentu atau suatu aturan yang tertulis. Norma hanya dibentuk sehubungan dengan hal-hal yang penting bagi organisasi, jika membantu anggota dalam organisasi untuk menyelesaikan suatu tugas merupakan hal penting, maka akan berkembanglah suatu norma, dan norma dapat diterima dalam berbagai macam tingkat oleh para anggota organisasi.

Sikap merupakan salah satu dari budaya pelayanan Sub Gagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat sikap ini merupakan kesepakatan individu tentang nilai-nilai atau aturan-aturan bersama dalam kehidupan bersosialisasi dan mengikat semua pelaksana pelayanan. Penerapan norma-norma atau aturan-aturan Sub Gagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat, sudah dilakukan sesuai prinsip pelayanan publik.

Prinsip ini selalu diingatkan oleh Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat. Norma atau aturan menentukan batas-batas normatif perilaku anggota atau aparatur Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat, menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan, menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh aparatur, menentukan cara-cara kerja yang tepat di KPU Provinsi Jawa Barat khususnya di Sub Bagian Humas.

Secara spesifik peran norma-norma atau aturan-aturan penting dilaksanakan oleh semua aparatur yang berada di lingkungan KPU Provinsi Jawa

Barat khususnya di Sub Bagian Humas. Dengan adanya norma-norma serta aturan-aturan tersebut diharapkan aparatur KPU Provinsi Jawa Barat khususnya di Sub Bagian Humas, dapat menciptakan tanggung jawab terhadap mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat dan mampu mendongrak partisipasi masyarakat khususnya masyarakat Jawa Barat.

Disiplin merupakan sikap patuh dan taat terhadap norma dan aturan yang baik berlaku baik yang tertulis mapun yang tidak tertulis, yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil kerja yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu disiplin kerja aparatur sangat mempengaruhi terhadap kinerja dalam suatu lembaga atau organisasi secara keseluruhan, apabila aparatur dalam organisasi tersebut memiliki tingkat kedisiplinan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka hasilnya akan baik dan bisa dikatakan cukup memuaskan dan secara tidak langsung akan membawa pengaruh yang positif bagi organisasi tersebut.

Berdasarkan keterangan masyarakat mengenai kedisiplinan aparatur Kantor Komisi Pemilihan Umum sudah cukup baik. Kedisiplinan tersebut terlihat bahwa jam 8.00 aparatur telah berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat begitu pula dengan jam istirahat serta jam pulang kantor sesuai waktu yang telah ditentukan. Mengenai disiplin perbuatan dalam melaksanakan mensosialisasikan hasil penghitungan suara melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* , aparatur telah melaksanakannya sesuai SOP yang telah dibentuk sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya.

Kedisiplinan yang perlu ditegakan oleh setiap aparatur meliputi disiplin waktu dan disiplin perbuatan agar tunduk dan taat pada aturan yang berlaku. Disiplin merupakan suatu bentuk ketaatan dan pengendalian diri, erat hubungannya dengan upaya pencapaian tujuan, oleh karena itu merupakan suatu ketaatan atau pengendalian diri yang rasional. Jika disiplin itu dapat dikembangkan secara meluas, maka akan tercapai suatu tingkat kestabilan dan kelancaran organisasi.

Kepercayaan dan kepuasan publik terhadap *performance*, baik instansi maupun pejabat publik, pada gilirannya dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan sektor swasta. Aliansi antara ketiga pilar tersebut (pemerintah, masyarakat, dan kalangan swasta) diperlukan untuk menghindari sikap dan perilaku aparat pemerintah terjebak dalam pola birokrasi yang kaku eksklusif dan kebebasan berkreasi.

4.4 Wewenang Yang Didelegasikan Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Dalam Mensosialisasikan Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 Melalui *Website* www.kpu.jabarprov.go.id

Wewenang hanya dapat dimiliki oleh unsur manusia, dalam kata lain manusia harus berperan aktif dalam suatu kegiatan. Tanpa peran serta tenaga kerja manusia, alat-alat handal dan canggih yang dimiliki suatu badan pemerintah. Manusia merupakan unsur terpenting dalam manajemen, karena tujuan manajemen dan proses manajemen ditetapkan oleh manusia. Organisasi yang

berbasis pengetahuan dicirikan oleh penggunaan informasi yang intensif serta pengetahuan sebagai sumber untuk menarik konsumen.

Kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai posisi atau jabatannya, maka setiap masalah dapat diselesaiakan dengan tepat, tanpa birokrasi yang berlebihan, kondisi ini sangat menguntungkan bagi organisasi merupakan bagian dari kecepatan memberikan respon dalam pelayanan kepada masyarakat. Memotivasi bawahan dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas bagi mereka untuk mengambil keputusan atau kebijakan dalam menyelesaikan pekerjaannya

Kewenangan seorang pemimpin untuk memberikan motivasi aparaturnya dalam mensosialisasikan mengenai hasil penghitungan suara melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* merupakan hal yang perlu dilakukan agar pegawai dapat merasa diperhatikan dan mampu menjalankan tugas dengan baik. Motivasi merupakan cara yang digunakan untuk merangsang pegawai untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Pentingnya Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat memberikan motivasi bagi aparatur, karena ada hal-hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku aparatur supaya mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Bentuk motivasi kepada pegawai tidak bisa disamaratakan, karena karakteristik pegawai berbeda tergantung kondisi sosial dan pendidikannya.

Kepala Sub Bagian Humas KPU Profinsi Jawa Barat dalam melaksanakan wewenang, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga dapat menerima masukan

atau aspirasi dari aparatur apabila dalam pelaksanaan wewenang dinilai dapat merugikan. Sikap tersebut merupakan sikap demokratis yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yang mampu menerima masukan dari aparatur, karena pelaksana kebijakan juga harus mempunyai sifat yang demokratis dalam mengambil keputusan agar keputusan yang dibuat tidak merugikan pihak lain.

Menurut hasil wawancara dengan aparatur Sub Bagian Humas seorang pemimpin di dalam melaksanakan kewenangan sudah cukup baik karena sudah memiliki kriteria-kriteria yang diharapkan, dalam arti seorang pemimpin harus memiliki kriteria yang lebih dari pada bawahannya misalnya jujur, adil, bertanggung jawab, loyal, energik, dan beberapa kriteria-kriteria lainnya.

Kepemimpinan merupakan sebuah hubungan yang kompleks, oleh karena berhadapan dengan kondisi-kondisi ekonomi, nilai-nilai sosial dan pertimbangan politis, serta berkaitan dengan peningkatan prodiktivitas, diperlukannya sosok pemimpin yang bukan hanya mampu mempengaruhi, memberi pengarahan, dan memberikan motivasi yang berupa perintah terhadap bawahan atau pegawai. Kepemimpinan, secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan produktivitas kerja para pegawainya.

Menurut uraian diatas sudah jelas bahwa Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat adalah seorang pemimpin yang dapat memotivasi para pegawainya, yang dapat memberikan arahan dan mendorong para pegawainya untuk dapat menyelesaikan tugas secara tepat, cepat kepada aparaturnya mengenai mensosialisasikan hasil penghitungan suara melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id.*

Hal ini diperlukan sikap seorang pemimpin yang benar-benar dapat membantu bawahan unuk mendapatkan kinerja aparatur yang efektif dan efisien, pemimpin yang memiliki model Konsiderasi, memiliki ciri – ciri ramah tamah, mendukung dan membela bawahan, mau berkonsultasi, mau mendengarkan pendapat bawahan, mau menerima usul bawahan, memikirkan kesejahteraan bawahan, memperlakukan bawahan setingkat dirinya. Tidak hanya memmentingkan kebijakan-kebijakan dirinya sendiri.

Sikap seoarang pemimpin yang benar-benar dapat memberikan motivasi bagi para pegawainya, menurut hasil penelitian sikap kepemimpinan yang dilakukan di dalam Sub humas KPU Provinsi Jawa Barat memiliki model konsiderasi yang memiliki ciri-ciri ramah tamah, mendukung dan membela bawahan, mau menerima usul bawahan, memikirkan kesejahteraan bawahan, memperlakukan bawahan setingkat dirinya dan tidak mementingkan kebijakan-kebijakan dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian bahwa sudah jelas bahwa sikap pemimpin Kepala Sub Bagian Humas menggunakan sifat Konsiderasi, yang dapat memberikan arahan yang positif bagi para pegawai dan dapat memotivasi para pegawai agar sosialisasi hasil penghitungan pemilihan gubernur suara melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* dapat disoasialisasikan kepada masyarakat,

Usaha peningkatan produktivitas kerja harus dimulai dengan memusatkan perhatian kepada sekelompok masalah yang berkaitan, termasuk tekhnologi, struktur organisasi, budaya organisasi, perubahan sifat pekerjaan dan pekerja, kebutuhan akan keluwesan produksi yang lebih besar, dan pergantian kekuasaan

dalam manajerial dan wewenang. Proses peningkatan produktivitas kerja memberi kesempatan terbaik untuk membangun pengalaman yang terus berkembang. Jadi, untuk membuat peningkatan yang berarti dalam produktivitas organisasi harus berusaha mencapai tingkat terbaik, upaya tersebut seharusnya menjadi aspek manajemen rutin yang berkesinambungan.

Seoarang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efisien, agar terjadi ketertiban dalam kegiatan organisasi diperlukan pengaturan mengenai pembagian tugas, cara kerja dan hubungan antara yang satu dengan pekerjaan yang lain. Pemimpin dapat diartikan predikat yang disandang seseorang sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan, maka pemimpin wajib melaksanakan fungsinya untuk memperoleh produktifitas.

Seoarang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan baik, agar terjadi ketertiban dalam kegiatan organisasi diperlukan pengaturan mengenai pembagian tugas, cara kerja dan hubungan antara yang satu dengan pekerjaan yang lain. Pemimpin dapat diartikan predikat yang disandang seseorang sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan.

Pemimpin yang sukses adalah seoarang yang dapat menciptakan kerja sama yang baik di antara internal dan exsternal *environment*, hal ini membutuhkan kelincahan mendapat informasi yang *up to date*, kecakapan analisis, ketepatan keputusan, dan kesediaan bekerja sama sosial yang saling mengguntungkan guna

menyebarluaskan informasi mengenai hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat melalui *website* *www.kpu.jabar.prov.go.id*.

Kemampuan dan kesediaan aparatur dalam memberikan informasi hasil penghitungan suara melalui *websit*e salah satu faktor untuk mewujudkan profesional pegawai. Kemampuan dan kesediaan seorang pegawai dalam menerima tugas-tugas yang diberikan kepadanya dapat menentukan kinerja pegawai dan tetunya ini merupakan nilai yang lebih bagi setiap pegawai yang berhasil mengembangkan *website* ini.

Kemampuan dan kesediaan aparatur dalam mengahadapai pekerjaan yang berbasis teknologi informasi, yaitu melalui *website* memang belum sepenuhnya optimal. Karena, penyesuaian pekerjaan yang dilakukan dalam *website* belum begitu menyeluruh dilakukan. Hal ini berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai.

Jumlah pegawai yang menguasai teknologi informasi masih sangat terbatas, sedangkan pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi informasi sangat banyak dan berat, serta membutuhkan konsentrasi yang besar. Besarnya kompensasi yang harus diberikan jika bekerja sama dengan organisasi yang bergerak di bidang teknologi informasi pun menjadi pertimbangan dalam pengaplikasian teknologi informasi ke dalam pekerjaan para pegawai.

Mensosialisasikan hasil penghitungan suara melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* pada pemilihan Gubernur, para apartur Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat tidak hanya memiliki kemampuan dan kemampuan melainkan harus harus memiliki pengetahuan dan keahlian. Menurut

hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, tingkat kemampuan aparatur Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa barat sudah memadai, tapi kita tidak bisa melihat orang perorang tetapi melihat secara umum mereka memmiliki kemampuan dan kemauan.

Para aparaturnya dituntut dituntut loyalitas yang lebih daripada lembaga pemerintah lain dalam hal-hal tertentu harus mau melaksanakan tugas yang melebihi jam kerja bisa (24) dua puluh empat jam sehari. Dan tidak ada kompensasi, dalam arti kompensasi ini jika bekerja secara berlebih akan mendapatkan gaji yang berlebih juga, tetap ini adalah loyalitas.

Menurut uraian diatas sudah jelas bahwa kemampuan aparatur Sub Bagian Humas KPU Provisi Jawa Barat sudah sangat memadai, dan dituntut loyalitas yang tinggi yang lebih daripada lembaga pemerintah lain dalam hal-hal tertentu harus mau melaksanakan tugas yang melebihi jam kerja bisa (24) dua puluh empat jam sehari. Dan tidak ada kompensasi, dalam arti kompensasi ini jika bekerja secara berlebih akan mendapatkan gaji yang berlebih juga.

KPU Provinsi Jawa Barat khususnya Sub Bagian Humas KPU memiliki kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh aparatur adalah harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai kepemiluan terutama dalam hal tata cara pemungutan penghitungan suara serta tata sara rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan, mulai dari tingkat TPS (tempat pemungutan suara), di PPK (panitia pemilihan kecamatan), di KPU Kabupaten Kota, sampai di KPU Provinsi.

Mensosialisasikan hasil penghitungan suara melalui *website* *www.kpu.jabar.prov.go.id* diperlukan cara kerja yang frofesional apartur yang tinggi untuk mendapatkan hasil penghitungan suara secara akurat, sehingga dapat segera mungkin diakses oleh masyarakat Jawa Barat.

Menurut hasil wawancara, frofesional aparatur KPU Provinsi Jawa Barat khususnya di Sub Bagian Humas KPU dalam menangani mensosialisasikan hasil penghitungan suara sudah cukup baik, walupun relatif, baik dalam artian harus ada ukurannya jika dibandingkan dengan lembaga lainnya, sikap profesionalisme yang dibutuhkan, harus sesuai dengan Job yang terdapat dibagian-bagian KPU, job tersebut diatur di bagian, baik Bagian Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu mengatur tugas menyiapkan penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data, teknis penyelenggaraan Pemilu di Provinsi serta proses verfikasi dan administrasi penggantian antar waktu.

4.5 Keadilan Dan Kelayakan Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Dalam Mensosialisasikan Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 Kepada Masyarakat Melalui Website *www.kpu.jabarprov.go.id*

Asas adil dan layak merupakan seorang pemimpin mengakui bahwa bawahan (pegawai) didalam usaha pencapaian tujuan, dengan pengakuan tersebut pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Motifasi adalah suatu perangsang atau daya pendorong dalam diri seseorang yang perlu dipenuhi agar orang tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Motivasi adalah daya pendorong yang menimbulkan kemauan dan kerelaan dalam diri individu untuk mengerjakan berbagai tugas yang menjadi

tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan. Motivasi timbul atas dorongan pada seorang individu yang dapat menggerakkan dan mengarahkan perilaku. Sedangkan motivasi kerja adalah proses mendorong, mengarahkan perilaku manusia yang berhubungan dengan lingkungan kerja untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara memotivasi para pegawai secara efektif ada beberapa hal yang mempengaruhi, *pertama*, memahami dasar proses motivasi, model kebutuhan, sasaran, tindakan dan pengaruh, pengalaman dan harapan. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, pola kehidupan yang mendorong kearah sasaran dan keadaan diaman kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi. *Ketiga*, mengetahui bahwa motivasi bukanlah bukan masalah hanya lebih banyak memberikan banyak uang. *Keempat*, mengetahui bahwa motivasi tidak hanya dapat dicapai dengan perasaan puas.

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan, yaitu suatu cara yang digunakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Oleh karena itu, seorang pemimpin perlu melakukan metode yang tepat dalam pemberian motivasi kepada bawahannya.

Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat hendaknya memiliki metode-metode motivasi metode-metode motivasi yang terdiri dari *pertama*, metode Langsung (*Direct Motivation*), adalah motivasi (materiil dan nonmaterial) yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti memberikan pujian, penghargaan, bonus, piagam, dan lain sebagainya.

Kedua, metode Tidak Langsung (*Indirect Motivation*), adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja/kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Motivasi tidak langung ini besar pengaruhnya untuk merangsang semangat bekerja, sehingga produktivitas kerja meningkat.

Menurut hasil penelitian bahwa Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat memberikan motivasi kepada pegawainya menggunakan motifasi tidak langsung yang merupakan pemberian motivasi dalam bentuk fasilitas-fasilitas pendukung dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat.

Sebelum memberikan motivasi kepada bawahannya, seorang pemimpin harus mengetahui, mempelajari, dan memahami terlebih dahulu apa yang menjadi motif bawahan tersebut mau bekerja. Seorang pemimpin mustahil memberikan motivasi yang sama kepada orang yang berbeda. Hal ini tergantung dari faktor-faktor yang mendorong seseorang mau bekerja, misalnya ada pegawai yang bekerja dengan tekun dan mempunyai loyalitas tinggi terhadap organisasi. Akan tetapi ada juga pegawai yang malas bekerja.

Pengintegrasian sumber daya aparatur melalui seorang pemimpin di Sub Bagian Humas KPU Propinsi Jawa Barat, merupakan cara untuk menyatukan para aparatur, baik aparatur yang baru ditempatkan maupun aparatur yang melalakukan program pelatihan di suatu tempat. Penyatuan sumber daya aparatur merupakan

penyesuaian pola pikir aparatur untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai kepentingan bersama.

Penyatuan sumber daya aparatur merupakan penyesuaian pola pikir aparatur untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai kepentingan bersama. Penyatuan aparatur memang tidak mudah dilakukan, membutuhkan waktu yang cukup lama supaya aparatur tersebut mau bekerja sama dalam melakukan pekerjaan yang diberikan. Karena para aparatur tersebut mempunyai pikiran, perasaan harga diri, dan sifat yang berbeda serta mempunyai latar belakang perilaku keinginan dan kebutuhan yang berbeda ke dalam organisasi.

Penyatuan aparatur memang tidak mudah dilakukan, membutuhkan waktu yang cukup lama supaya aparatur tersebut mau bekerja sama dalam melakukan pekerjaan yang diberikan. Karena para aparatur tersebut mempunyai pikiran, perasaan harga diri, dan sifat yang berbeda serta mempunyai latar belakang perilaku keinginan dan kebutuhan yang berbeda ke dalam organisasi.

Hambatan-hambatan tersebut tidak menjadi kendala dalam penyesuaian pola pikir aparatur dalam bekerja, yang bisa terlihat dari tingkah laku pegawai itu sendiri. Semakin lama aparatur tersebut melakukan penyesuaian, diamana pegawai itu ditempatkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mewujudkan profesional pegawai. Walaupun kenyataannya, tidak mudah untuk mewujudkan profesional pegawai melalui pengintegrasian yang ditetapkan. Dibutuhkan waktu dan pelatihan-pelatihan agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Aparatur Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat harus memiliki perilaku dan ketertarikan dalam segala hal, sikap percaya diri, berorientasi pada

tindakan, dorongan untuk selalu meningkatkan kualitas diri, serta sikap tanggung jawab yang dibutuhkan. Dalam memodernisasi KPU Provinsi Jawa Barat khususnya di Sub Bagian Humas, untuk memberikan pelayanan informasi hasil suara.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, diarahkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat yang dicirikan oleh: aparatur harus memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki jiwa yang sportif dan menjungjung tinggi etika profesi. Untuk lebih mempercepat pencapaian tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat, melakukan usaha guna mencapai kondisi ideal dalam upaya peningkatan kinerja aparatur.

Menurut uraian diatas sudah jelas bahwa aparatur Sub Bagian Humas KPU Provinasi Jawa Barat meningkatkan pelayanan masyarakat yang dicirikan oleh: aparatur harus memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki jiwa yang sportif dan menjungjung tinggi etika profesi.

Pentingnya motivasi bagi aparatur, karena ada hal-hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku aparatur supaya mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Bentuk motivasi kepada pegawai tidak bisa disamaratakan, karena karakteristik pegawai berbeda tergantung kondisi sosial dan pendidikannya. Motivasi aparatur dalam memberikan informasi mengenai mensosialisasikan hasil penghitungan suarapada pemilihan Gubernur Jawa Barat melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* di Sub Bagian Humas KPU Provinsi

Jawa Barat merupakan hal yang perlu dilakukan agar pegawai dapat merasa diperhatikan dan mampu menjalankan tugas dengan baik. Motivasi merupakan cara yang digunakan untuk merangsang pegawai untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

Peningkatan kinerja aparatur baik secara individu dan secara nasional akan dapat berdaya guna bila nilai-nilai dasar budaya kerja dapat diterapkan melalui proses sosialisasi, internalisasi dan institusionalisasi dengan cara penerapan nilai-nilai budaya kerja untuk pengembangan jati diri, sikap dan perilaku aparatur negara sebagai pelayanan masyarakat; penerapan nilai-nilai budaya kerja melalui pengembangan kerja sama dan dinamika kelompok; penerapan nilai-nilai budaya kerja untuk memperbaiki kebijakan public, penerapan nilai-nilai budaya kerja untuk memperbaiki pelaksanaan manajemen dan pelayanan masyarakat; penerapan nilai-nilai budaya kerja untuk memperbaiki pelaksanaan pengawasan, evaluasi kinerja dan penegakan hukum secara konsisten.

Peningkatan kompetensi aparatur, langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas aparatur sebagai berikut: melakukan standarisasi pendidikan minimal bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional sesuai dengan bidang tugas. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan bidang peningkatan SDM dalam rangka penempatan dan pengisian jabatan-jabatan didalam organisasi pemerintahan sehingga benar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Peningkatan motivasi kinerja aparatur merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan, mengingat keadaan yang selalu berubah dan berkembang sesuai

dengan kemajuan zaman. Pengembangan sumber daya aparatur merupakan salah satu untuk mewujudkan profesional pegawai supaya motivasi kinerja para pegawai tersebut dapat meningkat. Orientasi pengembangan sumber daya aparatur pada Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan profesional pegawai yang mengutamakan.

Pertama, tenaga-tenaga yang mampu dalam melakukan analisa pekerjaan, artinya analisa ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perencanaan akan kebutuhan aparatur, sehingga KPU Propinsi Jawa Barat di Sub Bagian Humas dapat merencanakan kebutuhan aparatur berdasarkan beban kerja yang menjadi tanggung jawab terhadap satuan unit kerja yang ada.

Kedua tenaga-tenaga yang mampu melakukan analisa untuk kinerja aparatur yang akan dihubungkan dengan imbalan jasa atas pelaksanaan tugas yang dilakukan artinya, analisa terhadap kinerja aparatur tidak hanya dilakukan seorang pegawai (secara individual), tetapi juga kelompok, serta bagaimana cara melakukan penilaian pekerjaan tersebut.

Ketiga, tenaga-tenaga terampil yang mampu melakukan pengukuran baik terhadap analisa kebutuhan aparatur, analisa pekerjaan, uraian pekerjaan, analisa jabatan, kinerja pegawai, imbalan jasa, yang disertai tolak ukurannya. *Keempat,* tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian ganda (*multi skilled*) artinya, aparatur yang berasal dari perguruan tinggi tidak hanya mempunyai satu keahlian saja.

Menurut uraian diatas bahwa Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat mengenai untuk mewujudkan profesional pegawai sudah cukup baik dikarenakan terdapat tenaga yang mampu dalam melakukan analisa pekerjaan,

artinya analisa ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perencanaan akan kebutuhan aparatur, tenaga yang mampu melakukan analisa untuk kinerja aparatur, pengukuran baik terhadap analisa kebutuhan aparatur, analisa pekerjaan, uraian pekerjaan, analisa jabatan, kinerja pegawai, imbalan jasa.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat mengadakan proses pelatihan dan pengembangan pegawai harus dilakukan secara sistematis agar sesuai sasaran. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengorganisasian program pelatihan dan pengembangan pegawai, yaitu melakukan penelitian dan pengumpulan data tentang aspek dari obyek yang akan dikembangkan.

Data yang didapat dari penelitian tersebut dapat dijadikan dasar dalam penentuan materi yang merupakan langkah kedua dalam penyusunan program pelatihan. Langkah ketiga adalah menentukan metode pelatihan yang tepat. Langkah keempat adalah menentukan pemateri pelatihan yang kompeten dengan materi dan metoda yang digunakan.langkah selanjutnya adalah mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelatihan. Langkah ke enam adalah menentukan peserta pelatihan.

Peningkatan kinerja aparatur baik secara individu dan secara nasional akan dapat berdaya guna bila nilai-nilai dasar budaya kerja dapat diterapkan melalui proses sosialisasi, internalisasi dan institusionalisasi dengan cara penerapan nilai-nilai budaya kerja untuk pengembangan jati diri, sikap dan perilaku aparatur negara sebagai pelayanan masyarakat, penerapan nilai-nilai budaya kerja melalui pengembangan kerja sama dan dinamika kelompok, penerapan nilai-nilai budaya

kerja untuk memperbaiki kebijakan publik, penerapan nilai-nilai budaya kerja untuk memperbaiki pelaksanaan manajemen dan pelayanan masyarakat, penerapan nilai-nilai budaya kerja untuk memperbaiki pelaksanaan pengawasan, evaluasi kinerja dan penegakan hukum secara konsisten.

Penyesuaian pekerjaan melalui *website* supaya para aparatur bersedia untuk menggunakan program yang telah ditentukan. Pegawai yang telah bersedia, karena pegawai tersebut telah melakukan pelatihan dan pendidikan sehingga kemampuan aparatur untuk penggunaan *website* Kemampuan aparatur untuk memahami pengolahan data-data kepegawaian yang diintegrasikan ke *server database* komputer, karena pegawai tersebut telah melakukan pelatihan dan pendidikan. Aparatur yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan internet dan *website.*

Menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan proses. Meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam pelaksanaan tugas. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Memberikan cara konkrit untuk perbaikan kinerja.

Pelaksanaan tugas aparatur Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil penelitian dapat dipaparkan bahwa pelaksanaan tugas masih dirasakan kurang baik dan perlu ditingkatkan lagi. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama menyangkut mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur Jawa Barat masih belum seperti yang diharapkan.

Menurut uraian diatas sudah jelas bahwa Aparatur Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat pelaksanaan tugas masih dirasakan kurang baik dan perlu ditingkatkan lagi, dan masih adanya dua ranggkap pekerjaan sehingga sering terjadi tumpang tindih. Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan tumpang tindih pelaksanaan tugas. Membantu Pejabat Administrasi Pemerintahan yang terlibat dalam proses pelayanan menjadi lebih mandiri. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar dan memberikan informasi kinerja.

4.6 Perhatian Timbal Balik Kepala Sub Bagian Humas Kpu Dalam Mensosialisasikan Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 Melalui *Website* ***www.kpu.jabarprov.go.id*.**

Seorang pemimpin untuk penanganan terhadap masalah yang dihadapi para aparatur mengenai suatu interaksi bisa dikendalikan. Pemimpin merupakan penggerak terhadap bawahannya untuk memberikan bimbingan dan motivasi nya secara aktif bagi para pegawainya. Pengintegrasian aparatur melalui pemimpin di Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat, merupakan cara untuk menyatukan para aparatur, baik aparatur yang baru ditempatkan maupun aparatur yang melalakukan program pelatihan. Penyatuan sumber daya aparatur dalam birokrasi merupakan penyesuaian pola pikir aparatur untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai kepentingan bersama.

Peran seorang pemimpin untuk penanganan terhadap masalah yang dihadapi para aparatur mengenai sosialisasi hasil penghitungan suara pada

pemilihan Gubernur Jawa Barat melalui website. Karena pemimpin merupakan penggerak terhadap bawahannya (pegawai) untuk menentukan arah dan tujuan, memberikan bimbingan dan motivasi.

Penyatuan aparatur memang tidak mudah dilakukan, membutuhkan waktu yang cukup lama supaya aparatur tersebut bisa bekerja sama dalam melakukan pekerjaan yang diberikan. Pola hubungan antar para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas saling membantu dan bekerjasama hal ini dilakukan untuk membangkitkan motivasi aparatur dalam mencapai keberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*.

Budaya kerja aparatur dapat diawali dalam bentuk nilai-nilai yang terkandung di dalam institusi, atau sistem kerja, sikap dan perilaku aparatur yang melaksanakan. Interaksi antara ketiga unsur penting itulah yang sangat mempengaruhi pengembangan budaya kerja, di samping faktor lingkungan yang sangat mempengaruhinya, unsur-unsur itu diinternalisasikan ke dalam setiap pribadi aparatur sehingga menghasilkan kinerja berupa produk dan jasa yang bermutu bagi peningkatan pelayanan masyarakat guna mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* . Untuk mengimplementasikannya diperlukan perbaikan persepsi, pola pikir, dan mengubah perilaku yang dilakukan dengan menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya kerja sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Berdasarkan hasil penelitian hubungan timbal balik antara Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat sebagai penentu kebijakan dan para pegawai yang melaksanakan tugasnya, pola hubungan sudah cukup baik saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi secara sehat, hal itu dilakukan dalam membangkitkan semangat dalam mencapai keberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*.

Para pelaksana kebijakan dalam menajalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama. Mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi kompetisi yang mereka lakukan secara positif.

Menurut uraian diatas sudah jelas bahwa pola hubungan para pelaksana kebijakan terlihat kooperatif mereka saling membantu, melengkapi dan mendukung satu sama lain dengan tujuan agar mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* dapat berhasil dilaksanakan, pola hubungan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas saling bekerjasama, akan tetapi hal tersebut dapat menjadikan keberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*

Kesediaan para pelaksana kebijakan untuk saling bekerjasama merupakan syarat yang penting untuk mencapai keberhasilan tujuan dari suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa para pelaksana kebijakan selalu bersedia

untuk bekerjasama di antara para pelaksana kebijakan. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan adalah saling memberikan masukan dan saling memberikan informasi. Hal ini terlihat dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan di Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat.

Evaluasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat terhadap hasil kerja anak buahnya mengenai tugas yang telah dilaksanakan misalnya Kepala Sub Bagian Humas mengecek laporan anak buahnya mengenai bagaimana mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemiihan Gubernur Jawa Barat melalui website *www.kpu.jabarprov.go.id.*

Setelah melihat hasil kerja anak buahnya Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat kemudian menunjukkan kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang ada pada hasil kerja anak buahnya. Langkah selanjutnya adalah memberikan cara atau metode yang lebih sesuai dengan kondisinya. Apabila kesalahan yang dilakukan berlangsung secara terus menerus Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat memberikan kritik-kritik yang membangun, yang dapat mencegah pelaksana kebijakan terbawa oleh arus yang keliru.

Menurut uraian diatas sudah jelas bahwa pelaksana kebijakan selalu bersedia untuk bekerjasama di antara para pelaksana kebijakan. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan adalah saling memberikan masukan dan saling memberikan informasi, dan Kepala Sub Bagian Humas KPU selalu mengecek bagaimana kinerja aparatur mengenai mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat melaui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id.*

Menurut hasil penelitian seoarang pemimpin organisasi mengakui dan menyadari bahwa tujuan organisasi baru akan tercapai bilamana tercapai kerjasama yang harmonis antara sesama bawahan, bawahan dan atasan serta terjadi interaksi yang baik diantara semua pekerja, saling ketergantungan, interaksi dan keterkaitan antara semua pekerja yang ada.

Aparatur merupakan bagian dari organisasi sebagai sebuah wadah dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi pasti memiliki pemimpin dan anggota Sebagai makhluk sosial, mereka pasti akan saling berinteraksi. Interaksi antara pemimpin dengan aparaturnya berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itulah, umumnya akan terbentuk pola hubungan dalam birokrasi yang mengendalikan ketertiban dari interaksi tersebut.

Aturan tersebut dapat berupa kesepakatan kerja bersama, bisa juga hasil otoritas pemimpin organisasi itu. Pola hubungan yang terjadi di lingkungan Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat, berjalan dengan baik dan harmonis hal ini dapat dilihat dari pola kinerja aparatur dan dari kepemimpinan Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat.

Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu karakteristik penting, dalam organisasi formal, pemimpin dapat menjalankan kekusaannya secara resmi, dalam organisasi informal pemimpin dianggap sebagai orang yang berwibawa dan dihormati karena dianggap dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik diantara organisasi dan anggotanya.

Pemimpin informal seringkali berganti-ganti karena situasi yang berbeda-beda. Pengarahan pimpinan dalam suatu organisasi merupakan pemberian pengarahan oleh pimpinan kepada bawahan agar bekerja dengan produktif dan disiplin serta memberikan penyuluhan agar berpartisipasi aktif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari dan merupakan salah satu wujud pembinaan pimpinan terhadap seluruh pegawainya.

Meningkatkan moral dan kepuasaan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya, sikap ini dicerminkan oleh moral kerja kedisiplinan dan prestasi kerja, menurut hasil penelitian diperoleh data bahwa beberapa pegawai yang telah termotivasi dalam bekerja, semangat kerja, dan prestasi kerjanya meningkat hal ini dapat dilihat dari para pegawai KPU khususnya di Sub Bagian Humas mencerminkan kerjasama yang baik dan menyelesaiakan tugas dengan cepat dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa aparatur Sub Humas KPU Provinsi Jawa Barat mempunyai motivasi kerja yang tinggi, produktifitas kerja nya meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerjanya yang semakin baik serta volume pekerjaanya yang semakin bertambah. Menurut uraian diatas sudah jelas bahwa aparatur Sub Bagian Humas KPU Jawa Barat produktifitas kerjanya sudah cukup baik karena ada peningkatan volume pekerjaan yang semakin bertambah.

Seorang pimpinan menunjuk sekelompok orang yang secara aktif merumuskan doktrin dan program lembaga serta mengarahkan kegiatan dan hubungan lembaga. Peran seoarang pemimpin sangat besar pengaruhnya untuk

meningkatkan kemampuan organisasi, untuk mengelola keanekaragaman, meningkatkan efesiensi organisasi, memberikan organisasi ke arah yang lebih baik , mengintegrasikan fungsi-fungsi dan anggotanya, dan membantu organisasi untuk mengembangkan srategi iplementasi.

Keinginan dan kegairahan individu dapat ditingkatkan dengan pertimbangan dua aspek motivasi yang bersifas statis. Aspek statis pertama tanpak sebagai kebutuhan pokok manusia yang menjadi dasar bagi harapan yang akan diperoleh lewat tercapainya tujuan organisasi, aspek statis kedua adalah berupa alat perangsang atau insentif yang diharapkan akan dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pokok yang diharapakan. Uapaya pimpinan dapat dilakukan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka mersa berguna penting,sehingga bawahan mendapatkan sedikit keberbasan membuat keputusan dan keatifitas dalam pekerjaanya.

Menurut hasil penelitian bahwa aparatur di Sub Bagian Humas KPU Provsi Jawa Barat, aparaturnya diberikan kesempatan yang luas untuk mengambil keputuasan atau kebijaksanaan dalam melaksanakan pekerjaannya dan tanggungjawab. Berdasarkan uraian diatas motivasi merupakan moral atau gairah kerja seseorang akan meningkat, jika kepada mereka diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya.

Peran seorang pemimpin untuk penanganan terhadap masalah yang dihadapi para aparatur mengenai suatu interaksi bisa dikendalikan. Karena pemimpin merupakan penggerak terhadap bawahannya (pegawai) untuk menentuakan arah dan tujuan, memberikan bimbingan dan motivasi.

Pengintegrasian sumber daya aparatur melalui seorang pemimpin di Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat, merupakan cara untuk menyatukan para aparatur, baik aparatur yang baru ditempatkan maupun aparatur yang melalakukan program pelatihan di suatu tempat.

Hambatan-hambatan tersebut tidak menjadi kendala dalam penyesuaian pola pikir aparatur dalam bekerja, yang bisa terlihat dari tingkah laku pegawai itu sendiri. Semakin lama aparatur tersebut melakukan penyesuaian, diamana pegawai itu ditempatkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan profesional pegawai. Walaupun kenyataannya, tidak mudah untuk mewujudkan profesional pegawai melalui pengintegrasian yang ditetapkan. Dibutuhkan waktu dan pelatihan-pelatihan supaya tujuan tersebut akan tercapai.

Motivasi kerja yang dicapai oleh seorang aparatur, yang menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Akibatnya akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efesien. Salah satu faktor yang berpengaruh untuk terciptanya adanya perhatian timbal balik antara aparatur adalah terjalinnya interaksi antara aparatur sebagai pelayan masyarakat untuk menyebarluaskan informasi mengenai hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* dapat berjalan dengan baik.